



Implementasi Kebijakan Tentang Proses Belajar Mengajar di Sekolah

Rafki Parifia^{1*}, Alexa Ayu Dewanda², M. Taura Zilhazem³, Fathur Rahman⁴, Sakban⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

230803046@student.umri.ac.id^{1*}, 230803048@student.umri.ac.id², 230803064@student.umri.ac.id³,
230803071@student.umri.ac.id⁴, sakban@umri.ac.id⁵

Korespondensi Penulis: 230803046@student.umri.ac.id*

Abstract. *The implementation of educational policies in schools plays a pivotal role in improving the quality of teaching and learning processes. The success of these policies is determined by the readiness of educational institutions, the professional competence of teachers, and the active involvement of various supporting stakeholders. Each of these elements significantly contributes to the effectiveness of learning outcomes in the classroom. However, policy implementation often faces challenges such as inadequate infrastructure, lack of comprehensive teacher training, and a mismatch between national policies and the specific needs of local educational contexts. In this regard, schools must be able to adapt policy frameworks to suit their unique environments, ensuring that the goals of the policy are effectively aligned with students' learning needs. Teachers play a central role as key implementers who are not only required to understand the substance of educational policies but also to apply them creatively and contextually in their classrooms. Their ability to interpret and operationalize these policies directly affects the quality of educational delivery. Furthermore, continuous evaluation is essential to measure the extent to which policies have been effectively implemented. This evaluation process serves not only as a feedback mechanism but also as a basis for future policy adjustments and improvements. It enables stakeholders to identify gaps, assess outcomes, and refine strategies to ensure sustainable educational development. In conclusion, effective policy implementation requires a holistic approach that involves institutional preparedness, teacher capability, stakeholder support, contextual adaptation, and ongoing evaluation. Without these elements working in synergy, even well-formulated policies may fall short in achieving their intended impact on educational quality and student success.*

Keywords: Education, Learning process, Policy implementation, Teachers, Teaching,

Abstrak. Implementasi kebijakan pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Keberhasilan kebijakan ini ditentukan oleh kesiapan lembaga pendidikan, kompetensi profesional guru, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan yang mendukung. Setiap elemen tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas hasil pembelajaran di kelas. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru yang memadai, serta ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik pendidikan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, sekolah dituntut untuk mampu mengadaptasi kerangka kebijakan agar sesuai dengan lingkungan dan kondisi masing-masing, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal dan relevan dengan kebutuhan belajar siswa. Guru memegang peran sentral sebagai pelaksana utama yang tidak hanya dituntut untuk memahami isi kebijakan, tetapi juga mengaplikasikannya secara kreatif dan kontekstual di dalam kelas. Kemampuan guru dalam menginterpretasikan dan menerjemahkan kebijakan secara praktis akan sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan pendidikan. Selain itu, evaluasi secara berkala menjadi hal yang penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan dengan efektif. Proses evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme umpan balik, tetapi juga sebagai dasar untuk penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi memungkinkan pemangku kepentingan mengidentifikasi celah, menilai hasil, dan menyusun strategi yang lebih tepat guna memastikan perkembangan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesiapan institusi, kemampuan guru, dukungan pemangku kepentingan, adaptasi kontekstual, dan evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Guru, Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Pengajaran, Proses Pembelajaran

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi pondasi utama dalam membuat sumber daya manusia dapat bersaing global dengan kualitas dan daya. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan arena utama untuk mentransfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan kepada peserta didik. Pemerintah Indonesia terus memperbarui kebijakan, seperti Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan proyek-based (Helandri & Supriadi, 2024). Studi menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil diterapkan secara optimal di seluruh sekolah karena ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan kondisi lokal, disparitas akses infrastruktur, serta lemahnya pemahaman guru terhadap teknologi dan model pembelajaran baru. Penerapan Kurikulum Merdeka mengubah peran guru dari penyampai materi menjadi fasilitator yang mendesain kegiatan pembelajaran berbasis proyek serta penilaian formatif.

Banyak guru mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat ajar dan asesmen holistik karena minim pelatihan dan literasi digital. Infrastruktur yang tidak merata khususnya di sekolah pedesaan juga menjadi kendala serius dalam penerapan metode inovatif dan pemanfaatan teknologi (Nurhayati & Mulyanti, 2025). Peran guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lain sangat krusial dalam menerjemahkan kebijakan menjadi strategi pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar implementasi tidak berhenti di dokumen kebijakan melainkan benar-benar berjalan holistik. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi dampak, serta memberi rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang (Naila Nur 'Azizah et al., 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji sejauh mana kebijakan belajar mengajar diimplementasikan pada praktik sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menyusun rekomendasi strategis agar kebijakan pendidikan dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metodologi studi literatur. Seperti artikel, jurnal, buku, dan laporan penelitian, literatur yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kajian literatur adalah kumpulan artikel yang tertulis menjelaskan informasi dan teori di masa lalu dan yang akan datang dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Data penelitian diperoleh melalui Google Scholar, website pemerintah

seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan repositori di kampus peneliti. Peran guru dalam kebijakan merdeka dan belajar merdeka belajar ditemukan dalam pencarian tersebut. Selanjutnya, teknik analisis konten digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari literatur.

Analisis konten adalah salah satu data yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang kata atau konsep yang ditemukan dalam literatur atau teks. Analisis konten dapat mencakup untuk membuat pertanyaan penelitian, memilih sumber data, memilih literatur yang relevan membuat kategori dapat digunakan dalam analisis, memperjelas isi ringkasan, menjelaskan dan menginterpretasi data yang diperoleh berdasarkan teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang diterapkan pada sekolah dasar dengan kurikulum merdeka kemudian hasilnya di implementasi dengan kurikulum merdeka sebagai berikut dijelaskan. Kepala sekolah dapat dilihat dari menimalisir penggunaan kertas dengan menggunakan konsep paperless, yang melibatkan penyediaan dasbor khusus dalam bentuk file digital yang dapat dikelola(Masri et al., 2023). Administrasi guru dapat mengunggah mereka belajar buat ke dasbor, yang memungkinkan kepala sekolah untuk memantau pengelolaan secara berkala dan memungkinkan penting untuk diatur dengan rapi.

Kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya memberikan bantuan kepada guru pada sekolah sebagai penggerak, ini dapat terus meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Guru yang akan pensiun ingin belajar bagaimana meningkatkan kinerja mereka (Hafidulloh et al., 2021). petugas yang ada didalam sekolah diberikan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi. Sekolah juga dapat berperan aktif dalam mendapatkan bantuan dana untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran.

Disusun dalam buku kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara yang memudahkan guru dalam mengembangkan lebih lanjut. Tujuannya dapat memberikan kelulusan yang melestarikan nilai-nilai Pancasila dan berkopeten terkait perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka(Ardy Wiyani, 2022). Dalam kurikulum merdeka juga, siswa diharuskan untuk menciptakan proyek untuk setiap kegiatan yang mereka lakukan. Sekolah memberikan wadah kepada siswa untuk menampilkan hasil karya mereka, dan meskipun fasilitas yang tidak seberapa, orang tua dan pihak sekolah membuat kerja sama dan pemerintah untuk mendukung acara siswa tersebut.

Penerapan penilaian dalam pelaksanaan belajar merdeka dan kurikulum merdeka membawa dampak negatif dan positif. (Rahmadhani et al., 2022). Sisi positifnya adalah guru

dan standar kelulusan siswa tidak ditekan seperti kurikulum merdeka, Adapun dari sudut siswa yang cenderung kurang tertarik berkompetisi. Tantangan yang guru hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah penggerak karena mereka harus mengalokasikan waktu setiap hari untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Kepala sekolah perlu merumuskan strategi yang baik untuk memotivasi guru, karena hal ini tidaklah mudah. Bagi guru senior, diperlukan bimbingan yang sesuai agar mereka lebih bersemangat untuk bergerak.

Penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan menunjukkan bahwa sekolah telah menyusun pendidikan dalam suatu penelitian berdasarkan kurikulum merdeka. Setelah proses penyusunan selesai, operasional satuan pendidikan tersebut mulai diterapkan. Walaupun penerapannya masih mengalami beberapa kendala dan belum sepenuhnya optimal, namun tetap dapat dilaksanakan. Ini disebabkan oleh peningkatan pemahaman guru yang terus berkembang seiring waktu dan menjadi salah satu aspek positif dari kurikulum merdeka dalam penerapan adalah guru memiliki kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran secara inovatif dan kreatif (Kurniati et al., 2020).

Proyek didalam kelas yang harus dikerjakan siswa untuk memberikan tantangan kepada mereka (Musa'ad et al., 2024). Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka, tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak hambatan muncul akibat situasi yang terjadi. Idealnya, pelaksanaan kurikulum merdeka dilakukan dalam setting kelas tatap muka. Namun, kebutuhan untuk menjalankan kurikulum merdeka memaksa sekolah untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi ini.

Siswa merasakan kesenangan dengan mempelajari kurikulum merdeka dan sulit untuk meninggalkan sekolah. Di sisi lain, tantangannya adalah pembelajaran masih dilakukan secara daring. Materi disediakan dalam pembelajaran secara fleksibel, yang dibutuhkan oleh siswa dan yang dipelajari guru. Istilah RPP telah diubah menjadi modul ajar dan guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan modul ajar dengan kebijakan pemerintah, melakukan modifikasi, atau berinovasi sendiri. Sementara itu, pemerintah menerbitkan ke sekolah modul ajar yang di akan digunakan. Dalam proses evaluasi kurikulum merdeka, informasi diperoleh hanya dari pelatihan, format evaluasi belum tersedia dan saat ini evaluasi yang ada hanya berbentuk proyek.

Penelitian dari kurikulum merdeka dari mulainya pembelajaran yang dibentuk komite. Adapun unsur dari komite pembelajaran memiliki dua guru kelas 1, guru kelas 2, IPAS, dan PPKN, ditambah dengan seorang pengawas dan guru lainnya, menerapkan kurikulum merdeka

sebagai penggerak sekolah sangat sulit dikarenakan harus banyak yang dipahami.(Fadhli, 2022).

Namun, sekolah tetap optimis bahwa masalah yang ada dapat diselesaikan. Selain itu, ada instruktur PSP, menyusun administrasi khusus dalam pendamping, dan pengawas bina yang dapat membantu mengatasi tantangan. Yang paling penting, ada pelatih ahli yang mengadakan pertemuan bersama setiap bulan. Sekolah yang bersih membuat semua orang akan terasa nyaman, adalah perubahan yang disadari oleh masyarakat sekitar. Sekolah penggerak aktif yang memiliki guru yang menyadari bahwa anak yang unik memiliki pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk setiap tingkat siswa (Manzis et al., 2024). Ini akan menghasilkan siswa yang bermoral, independen, mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, dan memiliki rasa kebhinekaan nasional dan global. Pencapaian yang sangat penting dari sekolah memberikan dukungan penggerak dari masyarakat sekitar sekolah, mulai dari orang tua hingga tokoh masyarakat lainnya.

Penerapan dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang disusun berupa perangkat pembelajaran, kurikulum merdeka belajar untuk mendukung peningkatan pembelajaran(Ilmawan, 2024). Capaian pembelajaran dapat membuat alur tujuan pembelajaran, dan rencana penilaian diagnostik, dan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Proyek dengan jangka waktu satu bulan atau sampai materi yang mencakup dua bab, membuat kolase dan montase. Profil siswa harus sesuai dengan proyek jangka panjang(Rosmana et al., 2023). Menurut Direktorat Sekolah Dasar, siswa memiliki profil Pancasila kemampuan global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebhinekaan global; bergotong royong; mandiri; berpikir kritis; dan kreatif.

Ringkasan hasil pada penelitian dapat ditunjukkan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.

Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka
Rahayu et al.	Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar menjadi penggerak di sekolah	▪ Pimpinan disekolah memberikan pengurangan dalam mengelola operasional sekolah. ▪ Guru dapat terus meningkatkan kualitas bimbingan pelajaran dari kepala sekolah dan rekan lainnya. ▪ Pengawas sekolah dilatih untuk mahir dalam teknologi. ▪ Kemendikbud telah menyiapkan buku kurikulum merdeka untuk dikembangkan oleh seorang guru.

		▪ Pelaksanaan belajar memiliki keterkaitan dengan profil pelajar pancasila.
Angga et al.	Komparasi Implementasi K13 dan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar	▪ Mewajibkan kepada siswa membuat proyek untuk setiap aktivitas. ▪ Pendidik menjalankan pembelajaran dengan kreatif. ▪ Dapat memudahkan proyek siswa supaya merasa tidak terbebani. ▪ Materi pembelajaran diberikan secara bebas, tergantung pada apa guru dan siswa.
Sumarsih et al.	Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Penggerak Di Sekolah Dasar	▪ Penetapan proses pembelajaran. ▪ Sekolah penggerak menjadi nyaman dan bersih. ▪ Sekolah menyediakan buku. ▪ Pimpinan sekolah memahami proses pembelajaran siswa dan menjadi mentor yang baik untuk guru disekolah dasar. ▪ Tenaga pendidik yang mengetahui berbagai anak dan memiliki metode pengajaran yang berbeda.
Barlian et al.	Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	▪ Membentuk pelaksanaan pembelajaran. ▪ Menerapkan asesmen diagnostic ▪ Memulai pembelajaran pjbl. ▪ Pelaksanaan dan pengolahan penilaian sumatif dan formatif, serta pelaporan hasil akhir belajar.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kurikulum dapat diterapkan secara mandiri di madrasah ibtidaiyah/sd. Kurikulum telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa masalah, terutama dalam hal asesmen. Namun, menurut Angga et al. dan Firdaus et al., mengimplementasikan kurikulum merdeka lebih mudah dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (Usanto, 2022). Mereka menemukan bahwa guru dapat memahami maknanya. Kurikulum merdeka adalah perubahan dari k13, yang memasukkan berbagai penyempurnaan. Kurikulum merdeka memberikan satuan pendidikan lebih banyak kebebasan untuk menyusun kurikulum mereka sendiri (Madhakomala et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Dengan diberikannya kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bakat mereka dan mendorong kemandirian dan pemikiran kreatif, kurikulum belajar merdeka mempromosikan kemandirian dan kreativitas. Untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah penggerak, memiliki banyak hambatan yang harus diatasi (Nisa et al., 2023). Yang paling penting adalah mendorong anggota sekolah untuk menerima perubahan. Kurikulum merdeka dimulai sejak tahun pertama, jadi masih memiliki beberapa kekurangan, tetapi umumnya lebih baik. Sekolah penggerak juga dapat berfungsi sebagai inspirasi, tempat latihan, dan panutan bagi kepala sekolah dan guru (Mariana, 2021). Hasil penyelidikan yang sudah dilakukan, merdeka belajar

masih jarang digunakan dalam penelitian karena masih digunakan. Dianjurkan menganalisis penelitian dalam kurikulum merdeka belajar baik di tingkat perguruan tinggi maupun jenjang sekolah dasar/MI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardy Wiyani, N. (2022). Merdeka Belajar untuk Menumbuhkan Kearifan Lokal Berbasis Nilai Pancasila pada Lembaga PAUD. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(2), 63–74. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v1i2.3782>
- Fadhli, R. (2022). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/jee.v5i2.4230>
- Hafidulloh, S. N. I., & Mochklas, M. (2021). Manajemen Guru: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru. *Bintang Pustaka Madani*, 1(1), 41.
- Helandri, J., & Supriadi, S. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern: Tinjauan Terhadap Praktik Dan Tantangan. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 93–116.
- Ilmawan, D. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 820–828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10546>
- Kurniati, P., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., & Haryanto, B. A. (2020). Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya Bagi Siswa Dan Guru Abad 21. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022(2), 408–423.
- Madhakomala, A., Rizqiqa, F. N. R., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162–172. <https://doi.org/10.55210/attalim.v8i2.819>
- Manzis, I., Hariandi, A., & Sholeh, M. (2024). Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 5(4), 558–568. <https://doi.org/10.51494/jpdf.v5i4.1470>
- Mariana, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(20), 10228–10233. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2606>
- Masri, M., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(4), 347–352.
- Musa'ad, F., Ahmad, R. E., Sundari, S., & Hidayani, H. (2024). Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(2), 1481–1487. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v8i2.3361>

- Naila Nur 'Azizah, Meysihinur, & Aziza, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Ta Lim Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 47–54. <https://doi.org/10.59098/talim.v2i02.1255>
- Nisa, S. K., Yoenanto, N. H., & Nawangsari, N. A. F. (2023). Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(3), 287–298.
- Nurhayati, & Mulyanti, D. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan di Era Digital: Optimalisasi Infrastruktur, SDM, dan Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(4), 376–383. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i4.698>
- Rahmadhani, P., Widya, D., & Setiawati, M. (2022). Dampak Transisi Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa. Rahmadhani P, Widya D, Setiawati M. Dampak Transisi Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa, 1(4).
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fauziah, A. N., Illahi, A. M., & Sarizaen, F. K. (2023). Proyek Profil Pelajar Pancasila Dalam Penguatan Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7843–7852. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1285/963>
- Usanto, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 495. <https://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/142>